



WASPADA

Jumat

9 Oktober 2015

Pemda Dalam Ekonomi Syariah

Oleh Mustafa Kamal Rokan

Pemda Yogyakarta memberikan bantuan sertifikasi halal bagi UKM. Hasilnya, jumlah produk bersertifikasi halal terus meningkat setiap tahun, mencapai 200 persen

Salah satu perbedaan perkembangan industri syariah di Indonesia dengan Malaysia adalah persoalan peran pemerintah (state role). Harus diakui, di negara Malaysia, ekonomi syariah lebih cepat "berlari" daripada di Indonesia yang hanya secepat "berjalan". Keberpihakan pemerintah Malaysia terhadap keberadaan ekonomi syariah sangat jelas dan kentara, misalnya penempatan dana BUMN Malaysia ke industri syariah. Demikian pula dana haji penduduk Malaysia ditempatkan di bank syariah, belum lagi keberpihakan negara melalui regulasi (syariah complaint) untuk menyebutkan sekedar contoh.

Sedangkan di Indonesia, industri syariah belum didukung secara serius oleh pemerintah. Misalnya, dana pemerintah belum ditempatkan di bank-bank syariah, bahkan dana Kementerian Agama sekalipun masih banyak beredar di bank konvensional. Belum lagi regulasi tentang ekonomi syariah yang masih sangat terbatas dan seterusnya. Dengan kata lain, jika Malaysia mengembangkan ekonomi syariah bersifat top down, sedangkan di Indonesia lebih berharap pada minat dan geliat masyarakatnya sendiri atau bersifat bottom up.

Namun demikian, kita tidak perlu kecil hati terhadap perbedaan keberpihakan ini. Sembari menunggu keberpihakan pemerintah pusat secara serius, kita masih bisa berharap dari pemerintah daerah (Pemda). Era otonomi daerah saat ini sungguh menyisakan harapan besar keberpihakan Pemda terhadap ekonomi syariah. Pemberian kewenangan besar kepada Pemda mengurus ekonomi mempunyai celah besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Syarat terpenting tentunya terletak pada kemauan (political will) Pemda atau lebih tepatnya kepala daerah untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Keberpihakan Pemda terhadap ekonomi syariah sebenarnya sudah mulai terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa

contoh daerah dapat dikemukakan misalnya, Pemda Yogyakarta membuat kebijakan ekonomi dengan memberikan bantuan sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha kecil (UKM). Hasil kebijakan ini, jumlah produk yang bersertifikasi halal di Yogyakarta terus meningkat setiap tahun, mencapai 200 persen. Jika sebelumnya hanya 200-an produk UKM yang bersertifikat halal, saat ini terdapat 500-an produk UKM yang telah bersertifikat di Yogyakarta.

Demikian pula Pemda Provinsi Sumatera Barat, selain membuat kebijakan pemberian sertifikat halal secara gratis bagi pelaku UKM, juga menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi peredaran makanan pelaku usaha UKM. Tidak hanya itu, Pemda Sumbar juga memberikan fasilitas modal bagi pelaku usaha kecil serta memberikan fasilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk memperoleh badan hukum. Hasil kebijakan ekonomi ini, terdapat 76 KJKS di kota Padang yang telah memiliki badan hukum. Menariknya, program yang merupakan tindak lanjut dari program Kredit Mikro Kelurahan (KMK) periode 2008-2009 merupakan dana berasal dari APBD pemerintah setempat. Program seperti ini tidak hanya membuat pertumbuhan ekonomi semakin menggeliat, juga dapat menyerap tenaga kerja secara luas.

Keberpihakan Pemda terhadap ekonomi syariah juga dilakukan Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemda NTB menerapkan kebijakan ekonomi dengan cara mendorong pembentukan koperasi syariah bagi masyarakat yang berminal membuat koperasi. Dengan program ini, pada kurun waktu 2009-2014 telah terbentuk 170 lebih koperasi syariah di NTB. Bahkan, Pemda NTB menargetkan 500 koperasi syariah terbentuk kurun tahun 2014-2019 ke depan. Sedangkan bagi koperasi konvensional, Pemda NTB memberikan pembebasan biaya perubahan akta notaris bagi koperasi konvensional yang sudah terbentuk

dan ingin mengubah menjadi koperasi syariah. Menariknya, Pemda NTB secara kreatif memberikan insentif bagi koperasi syariah dengan cara membebaskan biaya pembuatan akta notaris bagi masyarakat yang ingin membuat koperasi syariah yang baru.

Memperkuat Peran Pemda

Penguatan peran Pemda adalah sesuai amanat UUD 1945, dimana Pemda berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah seyogyanya diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Karena itu, mendorong Pemda untuk memperhatikan perkembangan ekonomi syariah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional—adalah sebuah keniscayaan dalam rangka mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah setempat. Pemda secara kreatif dapat membuat kebijakan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah. Beberapa bentuk peran Pemda terhadap perkembangan ekonomi syariah misalnya dapat berupa:

Pertama, pemerintah melalui political will dapat mengarahkan masyarakat menggunakan jasa industri ekonomi syariah seperti perbankan syariah. Misalnya dapat memberikan porsi dana-dana pemerintah untuk ditempatkan di perbankan syariah, seperti dana asuransi, dana pensiun juga proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD dapat diarahkan melalui perbankan syariah dan instrumen ekonomi syariah lainnya. Contoh penggunaan dana APBD dapat dilihat program KMK Pemda Sumbar yang secara serius mengalokasikan dana APBD mendorong industri syariah.

Kedua, memberikan keberpihakan kepada industri syariah melalui kebijakan khusus. Pemerintah daerah melalui mekanisme pengambilan kebijakan dengan DPRD dapat memberikan kebijakan khusus dalam

mengembangkan ekonomi syariah. Terkait pengambilan kebijakan, pemerintah daerah dapat melihat karakteristik, potensi dan peluang daerah tersebut dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Bagi daerah yang mempunyai karakteristik dan potensi wisata syariah misalnya, Pemda dapat memberikan kebijakan khusus berupa kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan hotel dan seterusnya. Pemda NTB misalnya, memberikan kebijakan khusus terhadap program wisata syariah sebab sebagaimana diketahui NTB dikenal sebagai daerah wisata dari dalam maupun mancanegara. Demikian juga Pemda Jawa Timur yang memberikan kebijakan khusus pemberdayaan ekonomi pesantren, sebab Jawa Timur adalah daerah yang banyak berdiri pesantren dimana sangat potensial dikembangkan ekonomi berbasis syariah.

Ketiga, memberikan fasilitas bagi lembaga ekonomi syariah. Harus diakui bahwa lembaga ekonomi syariah sangat membutuhkan peran pemerintah memfasilitasi instrumen ekonomi syariah agar dapat berjalan maksimal. Salah satu contoh penting adalah penguatan lembaga zakat dan wakaf. Sebagaimana praktek di lapangan, peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat lebih kepada fasilitator regulasi dan sistem kerja di samping tentunya program konkrit lainnya. Namun, pelaksanaan program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat lebih strategis dilakukan dilakukan oleh BAZDA dan BWI daerah dimana kinerja lembaga tersebut sangat dipengaruhi keberpihakan Pemda setempat. Pemda seyogyanya dapat memberikan fasilitas baik berupa pendanaan memadai maupun fasilitas berupa akses kegiatan produktif dan luas dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga ekonomi syariah.

Jika keberpihakan Pemda kepada instrumen dan lembaga ekonomi syariah semakin kuat, diyakini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan pesat—sembari berharap keberpihakan pemerintah pusat juga terus meningkat terutama di bidang regulasi dan kebijakan ekonomi secara umum. Semoga. Amin.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi (PUSAKE), Pengajar Hukum Bisnis FSH & FEBI UIN SU.